



Editor: Ina Hunga & Dewi Candraningrum
Pengantar : Emy Susanti

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDER:
Kepemimpinan, Ekologi, Kesehatan Reproduksi & Seksualitas**



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDER:

Kepemimpinan, Ekologi, Kesehatan Reproduksi & Seksual



Editor: **Dewi Candraningrum & Arianti Ina Restiani Hunga**

Pengantar: **Emy Susanti**

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDER:

Kepemimpinan, Ekologi, Kesehatan Reproduksi & Seksual



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDER

Kepemimpinan, Ekologi, Kesehatan Reproduksi & Seksual

Editor: Dewi Candraningrum dan Arianti Ina R. Hunga

©2015 ASWGI

Lukisan sampul : Ivan Ufuq Isfahan, *Arisan*, akrilik di atas kanvas, 60x70 cm

Tata letak : Inamul Haqqi

Diterbitkan oleh:

Asosiasi Pusat Studi Gender/Wanita dan Anak Indonesia (ASWGI)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Candraningrum, Dewi; Arianti Ina R. Hunga

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDER/ Candraningrum, Dewi; Arianti
Ina R. Hunga**

Jakarta: ASWGI

Cetakan I: 2015

xii + 456 halaman

ISBN: 978-979-1755-91-7

1. Gender I. Judul

Dicetak oleh:

Percetakan Jalasutra

www.percetakan.jalasutra.com

DAFTAR ISI

Kata Pengantar oleh Prof. Emy Susanti	1
1. Anggaunitakiranantika Konstruksi Sosial Perempuan Buruh Migran Malang di Hongkong: <i>Social Prestige</i> Versus Lilitan Hutang	1
2. Bernadus Wibowo Suliantoro & Caritas Woro Murdiati Harmoni Perempuan dalam Konflik Sumber Daya Hutan Wonosadi Gunung Kidul: Kajian Ekofeminisme	27
3. Emi Salmah Strategi Penguatan Profesionalisme Buruh Migran Internasional Asal NTB ke Hongkong: Kajian Kebijakan Gender	49
4. Ferena Debineva & Nadya Karima Melati Peran SGRC UI (<i>Support Group & Resource Center For Sexuality Studies</i> Univ Indonesia) untuk Pendidikan Reproduksi dan Seksual Remaja	75
5. Harmona Daulay, Nurman Achmad & Sulaiman Ginting Ketimpangan Gender dalam Relasi Kerja di Sektor Pertanian dan Rumah Tangga: Kajian Kebijakan Gender di Kecamatan Merek Kab Karo	91

6. E. Imma Indra Dewi	
Diskriminasi Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas: Kajian Kebijakan Gender	117
7. Arianti Ina Restiani Hunga	
Metodologi Perspektif Gender dalam Mengungkap "Ketersembunyian" Perempuan <i>Home-Workers</i> dalam Industri Berbasis Sistem <i>Putting-Out</i> : Studi Kasus Klaster Industri Batik di Sragen-Surakarta-Sukoharjo	139
8. Indria Nur	
Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Kepemimpinan Perempuan? Kajian Feminisme Islam	177
9. Keppi Sukesi	
Dekonstruksi Budaya "Perempuan Bukan <i>Tiyang Wingking</i> ": Kasus Perempuan Buruh Migran dari Propinsi Jawa Timur	201
10. Liza Husnita, Zulfa & Kaksim	
Peranan Perempuan Penambang Emas dalam Upaya Pembentukan Ketahanan Pangan dalam Ekonomi Rumah tangga Pedesaan di IV Nagari Kabupaten Sawahlunto Sumatera Barat	223
11. Marisa Elsera	
Pernikahan Dini di Kota Tanjungpinang Kep Riau: Kajian Kebijakan Gender	239
12. Masthuriyah Sa'dan	
Kepemimpinan Perempuan: Kajian Hermeneutika Teks Al- Qur'an & Hadist	253
13. Nini Anggraini & Dwiyantri Hanandini	
Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-nilai Sosial Lokal pada Masyarakat Minangkabau	273
14. Nurseli Debora Manurung	
Pengarusutamaan Gender dalam Disiplin Gereja: Kajian Feminisme Teologi Kristen	303

15. Padmi Dhyah Yulianti & Arri Handayani	
Peran Guru dalam Pendidikan Kespro & Seksual: Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak	321
16. Reni Kartikawati	
Pendidikan Kesehatan Reproduksi & Seksual bagi Remaja: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Kota Pontianak	335
17. Sari Damar Ratri	
Pendidikan Kespro & Seksual bagi Remaja dalam Pembangunan Indonesia: Kajian Antropologi	361
18. Titik Suharti	
Konsep Perlindungan Hukum Integratif dalam Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	379
19. Tiwuk Kusuma Hastuti, Sri Wahyuningsih & Nanang Rizali	
Model Pemberdayaan Perempuan Menuju Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Miskin di Kesatuan Pemangku Hutan Ngawi	395
20. Tri Susantari	
Gerakan Sosial Perempuan di Era Informasi: Kajian Feminis Marxis	415
21. Wahyu Pramono	
Perlindungan Orang Tua Terhadap Anak dari Tindak Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Gender	431

KATA PENGANTAR

Oleh Prof. Emy Susanti

Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, angka kemiskinan mengalami penurunan tetapi pada saat yang bersamaan terjadi ketimpangan yang meningkat secara signifikan. Angka kemiskinan menurun dari 16,66 persen pada 2004 menjadi 11,47 persen pada 2014 atau sekitar 68 juta penduduk miskin di Indonesia. Pada dekade yang sama ketimpangan melonjak drastis. Indeks rasio gini, sebagai salah satu indikator pengukur ketimpangan, meningkat dari angka 0,36 persen pada 2003 menjadi 0,42 persen pada 2013. Meningkatnya angka ketimpangan tentu mengurangi manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Artinya, fakta ketimpangan secara tidak langsung membuat warga miskin lebih sulit lagi keluar dari kemiskinannya. Pertumbuhan ekonomi dan mekanisme pasar bebas di Indonesia selama sepuluh tahun belakangan terbukti tidak menurunkan ketimpangan namun sebaliknya ketimpangan justru kian melebar (Bappenas, 2015).

Fakta kemiskinan dan ketimpangan juga diperburuk oleh fakta kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan seksual dan perdagangan manusia (Komnas Perempuan, 2015).

Fakta ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia menghadapi agenda penting pembahasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan paska 2015 (Sustainable Development Goals/Post 2015) yang akan

menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) tahun ini. Di Indonesia sendiri, ada tiga isu kritis menyangkut perempuan dan anak yang perlu dikedepankan antara lain; perkawinan anak (*early child marriage*, hak kesehatan seksual dan reproduksi, perlindungan buruh migran dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. *Pertama, World Fertility Policies, United Nations (2011)* mencatat ada sekitar 16 juta orang yang menikah pada usia dini. Indonesia menempati peringkat ke 37 dari 73 negara pada kasus kawin pertama usia muda, dan menempati peringkat tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI, 2007) menyebutkan 22 persen perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, di beberapa daerah ditemukan sepertiga dari jumlah pernikahan dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. BKKBN (2015) menunjukkan prevalensi umur perkawinan pertama berusia antara 15-19 tahun ada sebanyak 46 persen dari total jumlah perkawinan di Indonesia, bahkan yang menikah di bawah 15 tahun sekitar 5 persen. Faktor utama penyebab pernikahan anak di antaranya karena kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat dan kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan.

Kedua, Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi di Indonesia. Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI, 2012) menunjukkan AKI mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). Angka ini masih jauh dari target MDGs pada tahun 2015 yaitu 102/100.000 kelahiran hidup. Kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual juga masih terus menjadi ancaman bagi perempuan dan anak-anak Indonesia. Ketiga, perlindungan buruh migran dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang masih jauh dari harapan. Hal ini terkait erat dari persoalan kemiskinan perempuan dalam masyarakat. Jumlah buruh migran perempuan Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun yang masuk dalam sektor pekerjaan yang yang tidak berketrampilan (unskilled), tidak terlindungi (unprotected), bahkan tidak diakui (unrecognized) sebagai bentuk pekerjaan (UN Women, 2013).

Fakta kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi "pekerjaan rumah" yang serius dalam pembangunan untuk menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan

anak di Indonesia. Kebijakan Nasional Pemerintah saat ini secara eksplisit menjadikan perempuan dan anak sebagai bagian integral dari keseluruhan pencapaian pemenuhan hak-hak kemanusiaan yang utuh di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam agenda prioritas ke 2 Nawacita, yaitu meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; serta agenda prioritas ke 8 Nawacita, yaitu melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal. Dalam konteks ini, isu strategis yang masih harus diselesaikan dalam periode pembangunan 2015-2019 adalah: (1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan termasuk TPPPO; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

ix Untuk itu dibutuhkan kelembagaan PUG dan Anak yang kuat dan solid yang secara sinergis mendukung upaya Pemerintah. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan Pusat Studi Wanita/Gender di Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efektifitas dan kapasitas kelembagaan PUG. Menilik sejarah perkembangan kelembagaan PUG, Pemerintah Indonesia telah membentuk Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita di tahun 1978, menyusul terselenggaranya Konferensi Perempuan oleh PBB di Meksiko pada tahun 1975. Di lingkungan Perguruan Tinggi, pengembangan kelembagaan PUG terlihat dari adanya kebijakan Pemerintah di tahun 1987 yang mendorong didirikannya Pusat Studi Wanita di seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, PSW diharap dapat mendukung kebijakan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan bermitra kerja dengan Pemerintah Daerah.

Walaupun dalam perkembangannya PSW mengambil nama atau sebutan yang berbeda-beda akan tetapi pada intinya tetap melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan perspektif gender. Sampai dengan saat ini jumlah PSW/PSG tercatat lebih dari seratus PSW/PSG yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dari Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Agama. Pada tanggal 5

Desember 2014 di Jakarta, atas dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se Indonesia (ASWGI), yang kemudian disyahkan melalui Akta Notaris.

Pelaksanaan Konggres ASWGI sekaligus digabungkan dengan Konferensi Nasional “Perempuan Membangun Bangsa” untuk menjadi ajang bagi PSW/G dan Program Studi untuk saling bertemu dan mengkomunikasikan yang telah, sedang dan akan dilakukan selama ini dalam bidang substansi/keilmuan Kajian Perempuan/Gender. Konferensi mengambil momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengingatkan bahwa perempuan dan semua komponen bangsa sudah mengambil peran aktif dan harus terus mengambil peran yang lebih aktif lagi dalam membangun bangsa di masa-masa selanjutnya. Tema “Perempuan Membangun Bangsa” diambil untuk dapat merangkum berbagai subtema dan kajian yang selama ini telah dan sedang dilakukan.

Buku dengan Judul “Kebijakan Pembangunan Gender: Kepemimpinan, Ekologi, Kesehatan Reproduksi, dan Seksualitas yang tersajikan dalam Konggres dan Konferensi ASWGI merupakan buku ke-1 berupa kumpulan tulisan yang merupakan refleksi dari pengalaman dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat terkait dengan persoalan perempuan, gender, dan anak yang dihasilkan oleh beberapa penulis dalam buku ini. Tulisan dalam buku ini dipresentasikan oleh penulis dan dibahas dalam Konggres ASWGI. Paper lainnya yang dipresentasikan dan dibahas dalam konggres ini akan diakomodasi dalam buku ke-2.

Melalui karya yang tersajikan ini dan forum Konferensi ASWGI ini diharapkan menjadi ajang berbagi untuk saling memberikan pengalaman bersama, memberikan inspirasi, dan membangun sinergi ‘baru’ dalam melakukan aksi bersama menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak yang dimulai dari lingkungan akademik dan terdesiminasi ke masyarakat dan lembaga yang lebih luas.

Selamat Hari Kemerdekaan RI dan Selamat Berkarya bagi ASWGI.

Surabaya, 19 Agustus 2015

Ketua ASWGI

